



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DWI RETNO WILUJENG WAHYU UTAMI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 472124

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.488.000.000

1. Tanah Seluas 109 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,
WARISAN Rp. 432.000.000
2. Tanah Seluas 670 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp.
76.000.000
3. Tanah Seluas 413 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp.
50.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 64 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 930.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.100.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 771.927.250

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.394.927.250

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.394.927.250

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.